



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V – PROVINSI JAMBI**

JL.LINGKAR BARAT III RT.15
KEL.KENALI BESAR KEC.ALAM
BARAJO KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183
FAX : (0741) 3081183

EMAIL : bptd5jambi@gmail.com

Nomor : **UM.006/2/12/BPTD WIL.V-JMB/2023**
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Penyusunan Laporan
Monitoring Capaian Kinerja (LMCK)
Triwulan I Tahun 2023

Jambi, **17** April 2023

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Menindaklanjuti surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : IP.105/2/10/DJPD/2023 tanggal 29 Maret 2023, perihal Undangan dengan agenda salah satunya tentang sosialisasi tata cara pengisian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2023, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai,

Sigif Mintarso

NIP. 19680130 199003 1 001

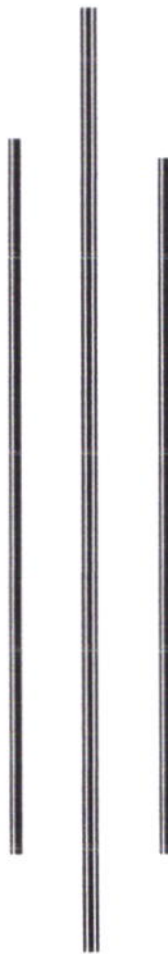
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Bagian Perencanaan
Setditjen Perhubungan Darat.



**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2023**

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	1. Pande Gede Semarapura, S.Kom., M.Si. 2. Dina Safitri, S.H. 3. Fadia Ardhina	1. Penyusun Rencana dan Pelaporan 2. Pengadministrasi Perkantoran 3. Pengadministrasi Perkantoran	17/04/2023 17/04/2023 17/04/2023	X S A
2.	Diperiksa	Harwinanto, S.E., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	17/4/2023	30
3.	Disetujui	Sigit Mintarso	Kepala Balai	17/4-2023	17

KATA PENGANTAR

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.



Dibuat di Jambi
Pada tanggal 17 April 2023

Kepala Balai



Sigit Mintarso

NIP. 19680130 199003 1 001

Ringkasan eksekutif

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 Triwulan I yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 19 Indikator dari 5 Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023 Triwulan I, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi telah melaksanakan dengan baik, 8 (empat) Indikator Kinerja kurang dari 100% ($0\% \leq IK < 100\%$), dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$).

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 65%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah hampir terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2.1. Bagan Struktur Organisasi	5
I.3. Sumber Daya Manusia.....	6
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	6
I.5. Sistematika Laporan.....	7
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	12
1.6.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilaya V Provinsi Jambi	15
I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	20
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	20
2.2.1 SK 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	27
IKK 1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	28
IKK 2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	30
IKK 3 Jumlah Terminal Tipe A & Terminal Barang yang beroperasi	31
IKK 4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	33
IKK 5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan Penyeberangan	34
IKK 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	36
2.2.2 SK 2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	39
IKK 7 Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	39
IKK 8 Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	42
IKK 9 Persentase pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP	42
2.2.3 SK 4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	44
IKK 10 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	45
IKK 11 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	48
IKK 12 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass, dan batas kecepatan	50
IKK 13 Jumlah ketersediaan taman edukatif	51
IKK 14 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	51



IKK 15 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	54
IKK 16 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan Bermotor	54
IKK 17 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	56
2.2.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	57
IKK 18 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi Darat	57
2.2.5 SK 5 Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat dan Akuntabel	59
IKK 19 Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan Darat	59
II.3. Realisasi Anggaran	62
II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023	62
II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023	65
II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	67
BAB IV PENUTUP	
III.1 Ringkasan Capaian	69
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	71

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Aksi Tahun 2023
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023



DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Sumber Daya Manusia BPTD Wilayah V Prpvinsi Jambi	6
Tabel I.2.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.....	13
Tabel I.3.	Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023.....	15
Tabel II.1.	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Triwulan I Tahun 2023	23
Tabel II.2.	Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023	62
Tabel II.3.	Rincian Per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023.....	62
Tabel II.4.	Rincian Revisi per sumber dana pagu awal Tahun 2023	63
Tabel II.5.	Rincian Revisi Per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023	63
Tabel II.6.	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023 ..	64
Tabel II.7.	Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2023.....	65
Tabel II.8.	Realisasi Anggaran Per Kegiatan DIPA TA. 2022	65
Tabel II.9.	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023	66
Tabel II.10.	Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023.....	66
Tabel II.11.	Tabel Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 1	41
Gambar III.2. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 1	44
Gambar III.3. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 2	45
Gambar III.4. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 2	47
Gambar III.5. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 3	48
Gambar III.6. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 3	50
Gambar III.7. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 5	52
Gambar III.8. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 5	54
Gambar III.9. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 6	55
Gambar III.10. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 6	58
Gambar III.11. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 7	59
Gambar III.12. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 7	62
Gambar III.13. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 9	63
Gambar III.14. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 9	66
Gambar III.15. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 10	68
Gambar III.16. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 10.....	70
Gambar III.17. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 11	71
Gambar III.18. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022	



pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 11.....	73
Gambar III.19. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 14	76
Gambar III.20. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 14.....	78
Gambar III.21. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 16	80
Gambar III.22. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 16.....	82
Gambar III.23. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 18	84
Gambar III.24. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 18.....	87
Gambar III.25. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 19	88
Gambar III.26. Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 19.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Aksi Tahun 2022
2. Revisi Rencana Aksi Tahun 2022
3. Rencana Kinerja TahunanTahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2022
5. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2022
6. Revisi II Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2022
7. Revisi III Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2022
8. Perjanjian Kinerja Kasubbag Tata Usaha Tahun 2022
9. Revisi I Perjanjian Kinerja Kasubbag Tata Usaha Tahun 2022
10. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022
11. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022
12. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2022
13. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2022
14. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Tahun 2022
15. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraannya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah yang dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing masing instansi pemerintah tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib membuat Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPTD Tipe B menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan

penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional, pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas Melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, Pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan /atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan tarif angkutan jalan.

4. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

Mempunyai tugas Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan

kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

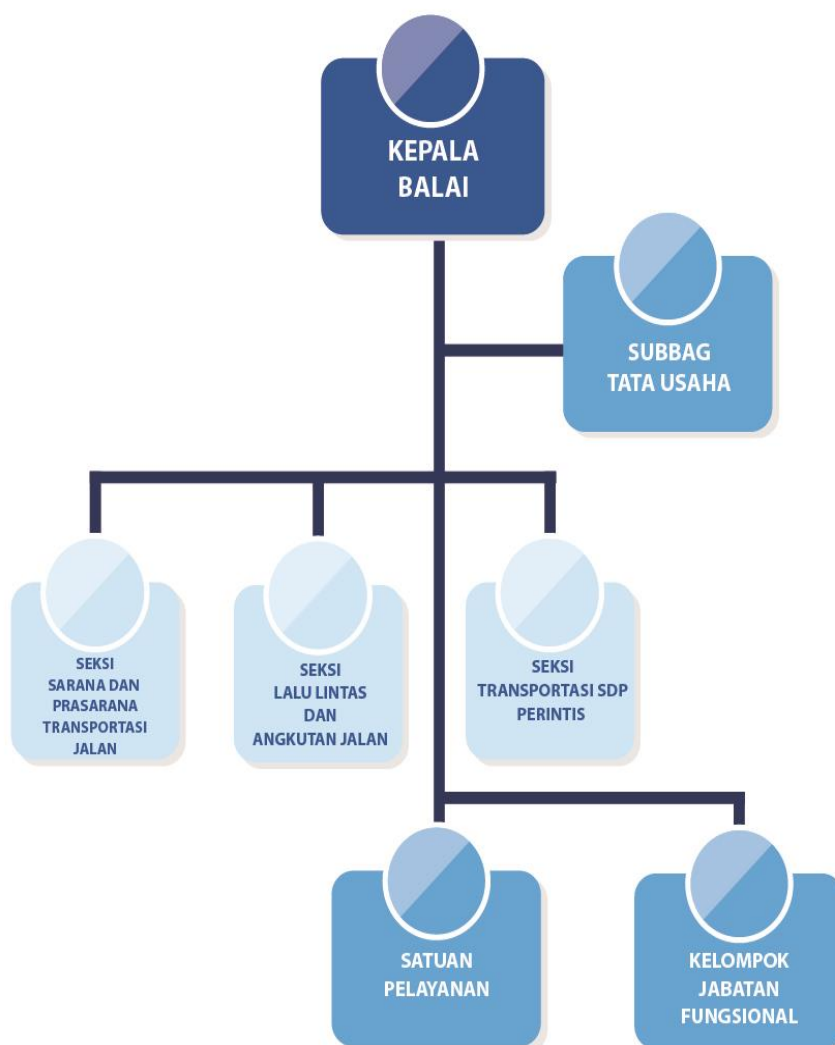
5. Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan. Kerangka Kelembagaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPTD TIPE B



Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe B

I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah sebanyak 331 orang dengan rincian 159 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 172 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia BPTD Wilayah V Provinsi Jambi

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TOTAL
		PNS	PPNPN	
1	KANTOR INDUK BPTD WILAYAH V PROV JAMBI	50	35	85
2	TERMINAL TIPE A ALAM BARAJO KOTA JAMBI	12	31	43
3	TERMINAL TIPE A BUNGO	12	22	34
4	TERMINAL TIPE A BANGKO	12	20	32
5	TERMINAL TIPE A SAROLANGUN	10	15	25
6	UPPKB JAMBI MERLUNG	16	25	41
7	UPPKB PELAWAN SAROLANGUN	19	6	25
8	UPPKB MUARA TEMBESI	28	12	40
9	UPPKB KERINCI KOTA SUNGAI PENUH		1	1
10	WILKER PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KUALA TUNGKAL		5	5
JUMLAH		159	172	331

I.4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu disusun program kerja, melalui program kerja akan terlihat tahapan-tahapan yang dilakukan serta dukungan materi atau bahan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan program kerja/ kegiatan ini ada beberapa persyaratan/ kriteria yang perlu dipenuhi. Beberapa kriteria tersebut antara lain:

- 1) Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 2) Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;

- 3) Proses pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Terminal Tipe-A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
- 4) Perencanaan anggaran dan proses pengadaan.

I.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN I

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.3.1. SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
 - II.3.1.1 IKK 1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - II.3.1.2 IKK 2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.1.3 IKK 3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.1.4 IKK 4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.1.5 IKK 5. Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberangan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.1.6 IKK 6. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.2. SK. 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.3.2.1 IKK 7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

a.1) Definisi Indikator Kinerja

- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.2.2 IKK 8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.2.3 IKK 9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3. SK. 4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat

II.3.3.1 IKK 10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.2 IKK 11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.3 IKK 12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.4 IKK 13. Jumlah ketersediaan taman edukatif

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.5 IKK 14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.6 IKK 15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE)*

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.7 IKK 16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3.8 IKK 17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja

- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.4 SK. 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

II.3.4.1 IKK 18. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.5 SK. 1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

II.3.5.1 IKK 19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

- 1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- 2. Refocusing Anggaran Tahun 2023
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
- 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2023

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023
3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023
4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (table perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Aksi Tahun 2023
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023
5. Lain-lain yang dianggap perlu

I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
GA	PROGRAM INFRASTRUKTUR					
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	5	5
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	7	7
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan	%	80	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-	100
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100

SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	50	100
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	2	0
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	30	50
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	1
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	2000
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	50	250
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90
WA			PROGRM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perkantoran Ditjen Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perhubungan Darat	Nilai	80	90

I.6.1 Uraian / Narasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023 terdiri atas Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan	%	0

		SMART terminal tipe-A		
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

1.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2023 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 101.360.757.000,- adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

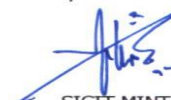
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80



		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

ANGGARAN

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 14.985.836.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.760.540.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 48.351.251.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 583.680.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.902.143.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi


SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *E-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2023

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:



1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Triwulan I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
						T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi																
IKK 1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	27	27%											
IKK 2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0	0	0	100%											
IKK 3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%											
IKK 4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	0	0	100%											
IKK 5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100%											
IKK 6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	6	6	100%											



SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan transportasi darat														
IKK 7	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	95	95	95	100%									
IKK 8	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	%	0	0	0	100%									
IKK 9	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	100	100%									
SK3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat														
IKK	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80	24	30%									
IKK	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1	0,25	25%									
IKK	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0	0	0	100%									
IKK	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	100%									



IKK	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	0	0	0%									
IKK	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	0	0	0	100%									
IKK	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	20	20%									
IKK	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70	70	0	0%									
SK4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat														
IKK	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	87	17,4	20%									
SK5	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel														
IKK	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen	Nilai	88	88	17,6	20%									



Perhubungan Darat													
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan													
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan													
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK$\geq$100%)	11												
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%$\leq$IKK<100%)	8												

Selama tahun 2023, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 19 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan salah satu Balai di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. IKK 2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda
3. IKK 3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
4. IKK 4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda
5. IKK 5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
6. IKK 6. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

2.2.1.1. IKK 1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Penyelenggaraan angkutan jalan perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan jumlah trayek angkutan perintis yang dilayani. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{683 \text{ RIT}}{2494 \text{ RIT}} \times 100\%$$

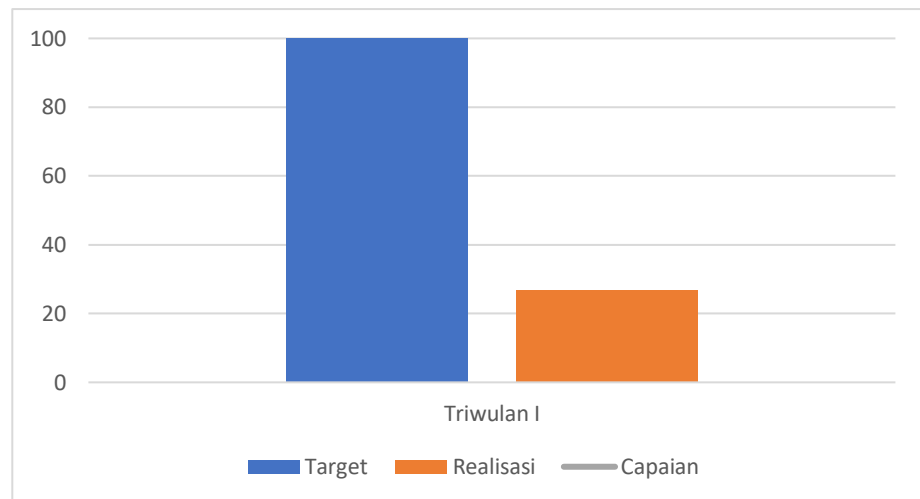
Keterangan:

Trayek yang dilayani adalah:

- a. Senyerang – Teluk Nilau – Kuala Tungkal;
- b. Desa Tanah Tumbuh – Sp. Niam – Terminal Muara Bulian;
- c. Desa Bangun Seranten – Terminal Bungo;
- d. Desa Batu Kerbau – Terminal Tipe A Muara Bungo;
- e. Desa Sari Mulya – Terminal Tipe A Muara Bungo;
- f. Desa Suo-Suo – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
- g. Desa Sentano – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
- h. Desa Mekar Jaya – Terminal Muara Bulian – Terminal Alam Barajo Jambi.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 sebesar 27% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 27%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dibawah ini :



Gambar II.1 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 1

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- Peraturan Menteri No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

- Tersedianya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas;

c. Faktor-faktor kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

- Tidak tersedianya anggaran;
- Sarana dan prasarana tidak memadai;

- Kurangnya SDM.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{27}{100} \times 100\% = 27\%$$

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 27%.

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun realisasi anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 4.985.836.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.124.644.587,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan subsidi angkutan perintis di Provinsi Jambi;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait dengan pembukaan rute angkutan perintis yang baru;
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang belum memadai.

2.2.1.2. IKK 2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.

2.2.1.3. IKK 3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di Jalan.

Indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyelenggaraan kelancaran operasional Terminal Tipe A dan memastikan tata Kelola sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif. Terminal Tipe A yang beroperasi di Provinsi Jambi ada 4 Terminal diantaranya adalah:

- a. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
- b. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
- c. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
- d. Terminal Tipe A Muara Bungo.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2022 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



G

Gambar II.2 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 3

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Sumber daya manusia yang mencukupi, terampil, dan berintegritas;
- Tersedianya anggaran operasional;
- Tersedianya sarana dan prasarana.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia;
- Tidak adanya anggaran operasional;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Capaian Jumlah pelaksanaan Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian presentase pelaksanaan Terminal Tipe A dan Terminal Barang berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 9.174.025.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.221.370.257,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan.

2.2.1.4. IKK 4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 202

Tidak ada kegiatan Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2023.

2.2.1.5. IKK 5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

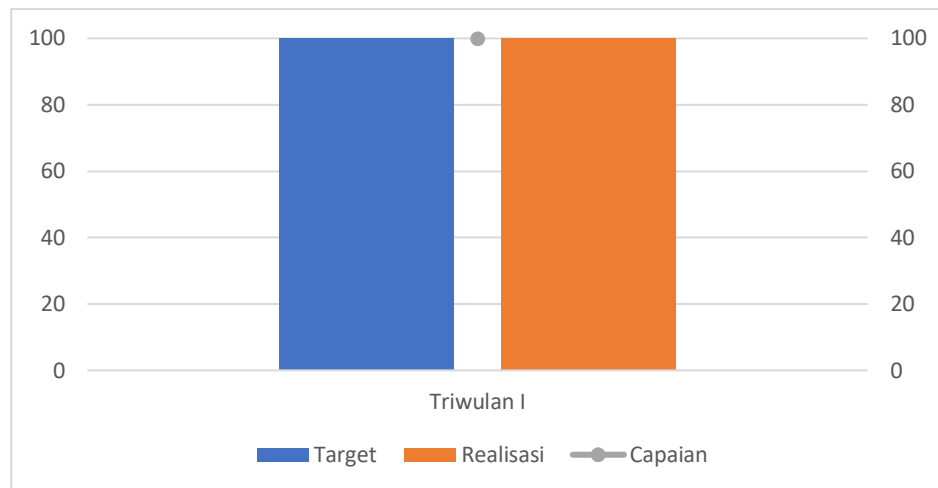
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan penyeberangan perintis dengan jumlah daerah yang tertinggal, terpencil dan terluar.

Kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan perintis salah satunya dilakukan untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju.

Capaian kinerja pada indikator persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan ini terdapat di pelabuhan penyeberangan yang ada di Kuala Tungkal dengan ada 1 rute yang terdapat pengawasan yang bertugas dari BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yaitu Kuala Tungkal – Dabo.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



II.3 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 5

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebagai berikut :

- Sumber daya manusia yang mencukupi, terampil, dan berintegritas;
- Tersedianya anggaran operasional;
- Tersedianya sarana dan prasarana.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia;
- Tidak adanya anggaran operasional;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp.586.515.000,- Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 76.112.000,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan Standar Pelayanan Minimal terhadap fasilitas Dermaga Pelabuhan dan Kapal Penyeberangan;
2. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
3. Meningkatkan pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan.

2.2.1.6. IKK 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Sedangkan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan Sungai, Danau, Waduk, dan Terusan. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang Beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

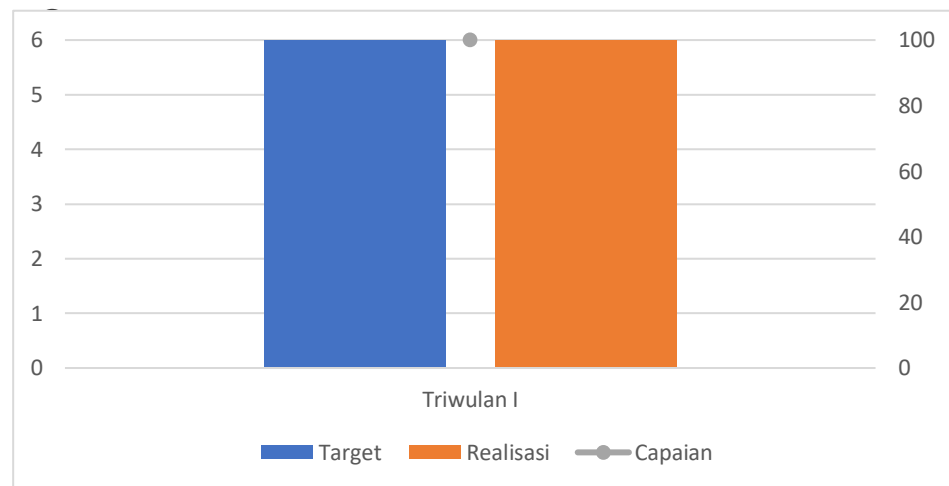
Pelabuhan Pelabuhan SDP yang beroperasi saat ini berjumlah 6 pelabuhan, adapun rincian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yaitu:

- Pelabuhan sungai penyeberangan kuala tungkal (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Sarolangun (Tidak Beroperasi);

- Pelabuhan sungai Kuala Jambi (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Nipah Panjang (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Muara Sabak (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Angso duo (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Jambi (Beroperasi);
- Pelabuhan sungai Muara Bulian (Tidak Beroperasi).

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 6 Lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 6 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.4 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 6

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- Peraturan Menteri No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

- Tersedianya anggaran;
- Melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelabuhan;
- Pengawasan operasional Pelabuhan.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Minimnya pelaksanaan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelabuhan;
- Tidak optimalnya pengawasan operasional pelabuhan.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Indikator Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 586.515.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 76.112.000,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik;
3. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun.

2.2.2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan salah satu balai di bawah direktorat jenderal perhubungan darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya kinerja pelayanan transportasi darat.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A;
2. IKK 8. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A;
3. IKK 9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

2.2.2.1. IKK 7 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

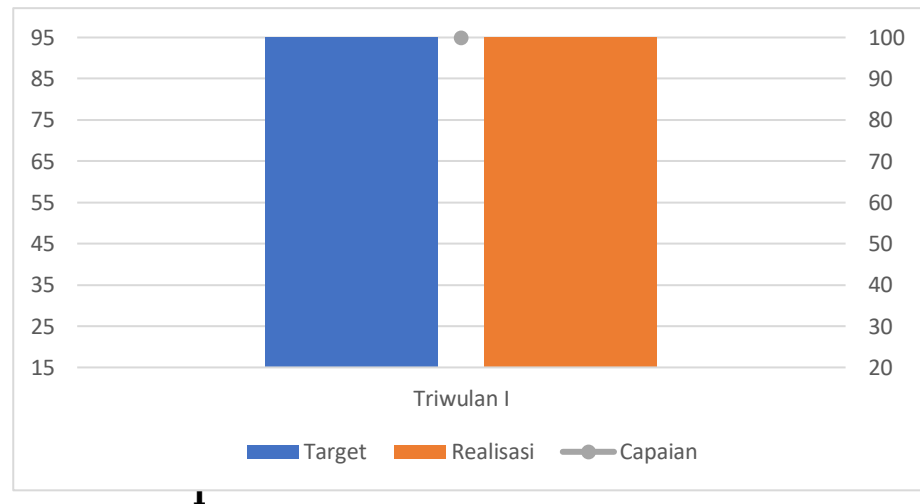
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Capaian kinerja pada indikator Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A ini mencapai sebesar 95% dan terdapat 4 TTA di Provinsi Jambi yang telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan ketentuan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 95% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 95%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.5 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 7

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Sumber daya manusia yang mencukupi, terampil, dan berintegritas;
- Tersedianya anggaran operasional;
- Tersedianya sarana dan prasarana.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia;
- Tidak adanya anggaran operasional;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

d. Rumus Capaian:

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{95}{95} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 8.737.167.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 8.716.235.463,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan.

2.2.2.2. IKK 8 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada Tahun 2023.

2.2.2.3. IKK 9 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

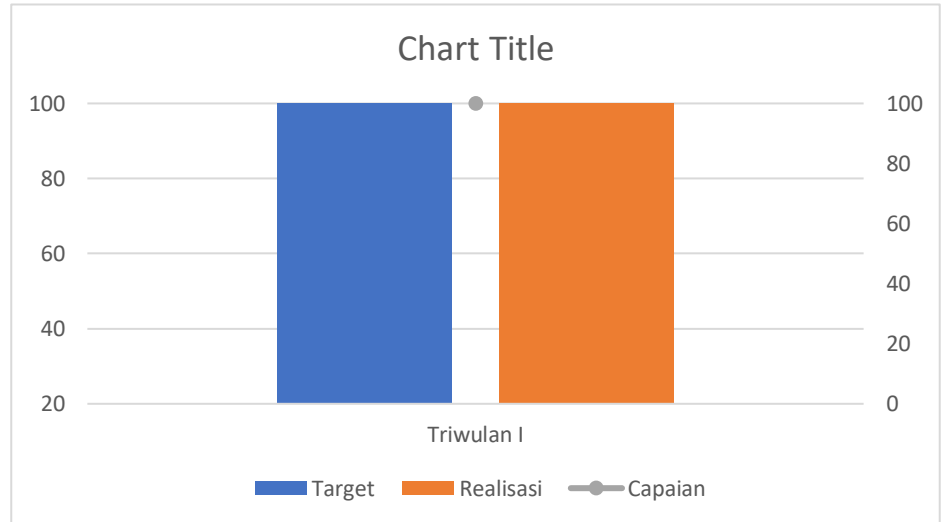
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Pelabuhan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Capaian kinerja pada indikator Persentase pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP tercapai sebesar 100%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian I



II.6 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 9

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- Peraturan Menteri No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Kualitas SDM;
- Pelaksanaan pengawasan secara periodik.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana tidak memadai
- Kurangnya SDM;
- Tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal sudah dilaksanakan dengan baik dengan pengawasan dari Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu tidak ada anggaran untuk IKK tersebut.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.

2.2.3. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan salah satu Balai di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan

pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya keselamatan transportasi.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass, dan batas kecepatan;
4. IKK 13. Jumlah ketersediaan taman edukatif;
5. IKK 14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
6. IKK 15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE);
7. IKK 16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. IKK 17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP.

2.2.3.1. IKK 10 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1) Definisi Indikator Kinerja

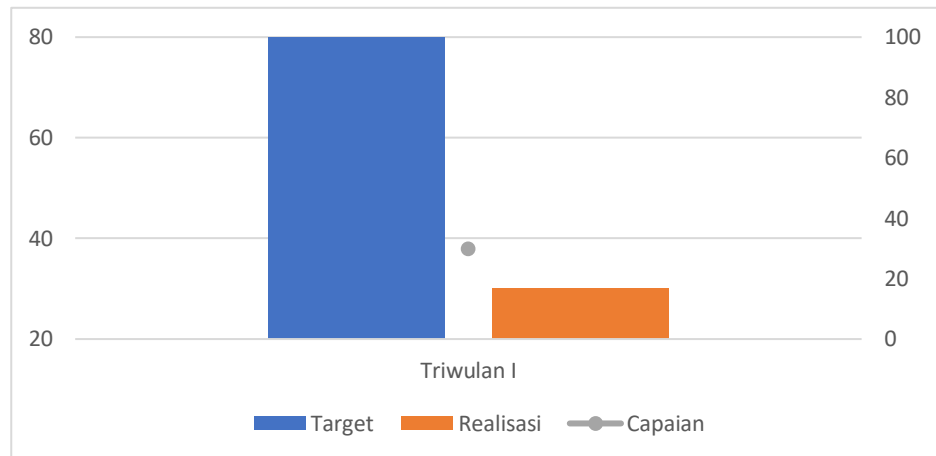
Pada indikator Kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terdapat beberapa kegiatan yaitu :

- Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan;
- Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK);
- Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan;
- Pemeliharaan perlengkapan jalan.

Capaian kinerja pada indikator persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 30%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2023 sebesar 24% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 30%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



I

Gambar II.7 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 10

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

- Tersedianya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
- Optimalnya pengawasan pembangunan.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{24}{80} \times 100\% = 30\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu :

1. Pagu anggaran Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 15.203.016.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 6.004.459.000.
2. Pagu anggaran Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan sebesar Rp. 1.500.000.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 0.
3. Pagu anggaran Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 4.920.200.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 0.
4. Pagu anggaran Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 700.300.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 0.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rusak;

2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
3. Berusaha melaksanakan pembangunan yang tepat waktu.

2.2.3.2. IKK 11 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

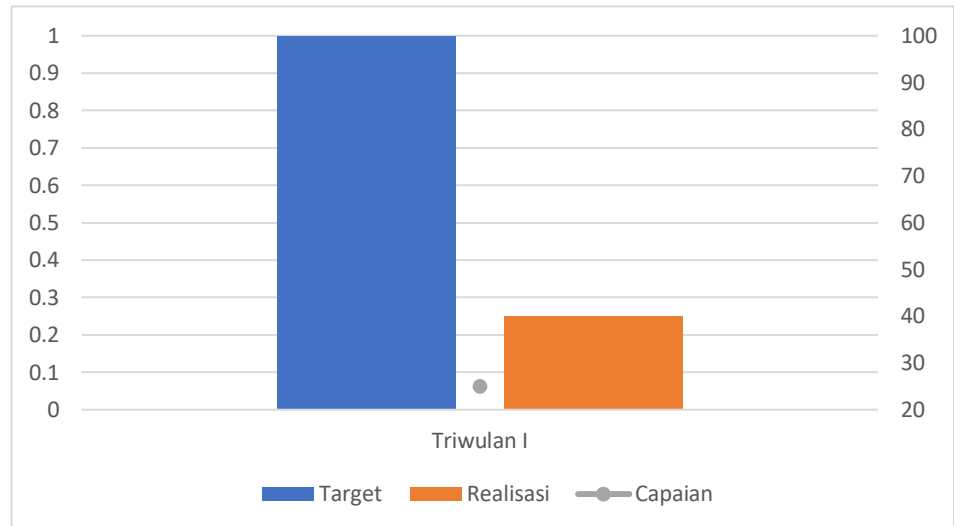
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

Pada IKK tersebut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor disebut UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran Over Dimensi dan Over Load.

Capaian kinerja pada indikator persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini sebesar 1%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 sebesar 0,25% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 1%, maka capaian kinerja mencapai 0,25%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambr II.8 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja
Tahun 2023 IKK 11

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

- Patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
- SDM yang cukup;
- Sarana dan prasarana yang memadai.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

- Tidak patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;

- Kurangnya SDM;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,25}{1} \times 100\% = 25\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu :

1. Pagu anggaran Operasional UPPKB sebesar Rp. 4.990.735.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 736.480.478.
2. Pagu anggaran Rehabilitasi / Peningkatan UPPKB Pelawan Sarolangun Jambi sebesar Rp. 18.900.000.000 dengan Triwulan I sebesar Rp. 0.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait Over Dimensi Over Load (ODOL) kendaraan barang;
2. Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan Over Dimensi Over Load (ODOL);
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

2.2.3.3. IKK 12 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada Tahun 2023.

2.2.3.4. IKK 13 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif Tahun 2023.

2.2.3.5. IKK 14 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

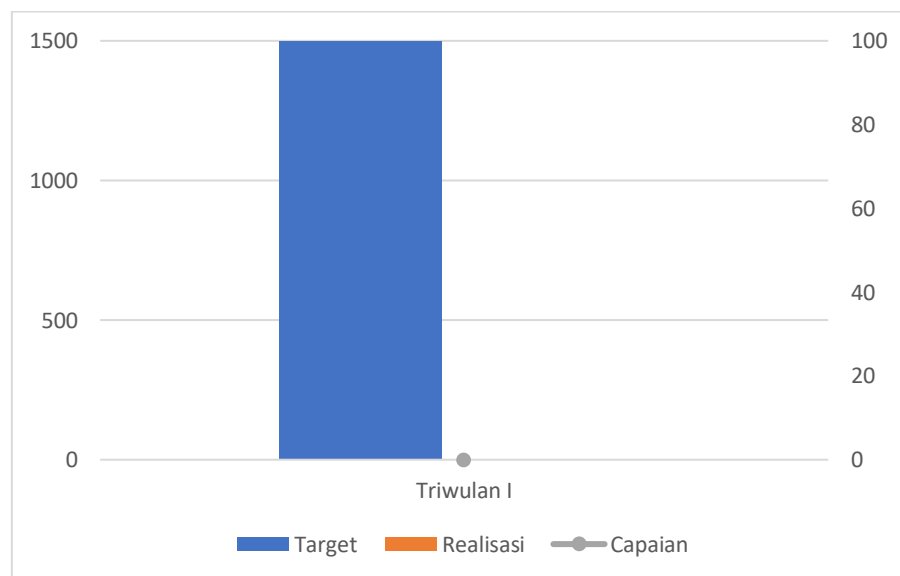
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi

keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat.

Kegiatan pada IKK tersebut untuk mengkampanyekan keselamatan dalam berlalu lintas kepada masyarakat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023 sebesar 0 orang dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 1.500 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.9 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 14

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

- Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
- Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

- Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
- Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Kurangnya SDM.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2022.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1500} \times 100\% = 100\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 0,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan edukasi kesadaran tertib berlalu lintas;
2. Melakukan pemeliharaan terhadap ZoSS yang terpasang;
3. Melakukan koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas.

2.2.3.6. IKK 15 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE) pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tidak ada kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE) pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE) pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE) Tahun 2023.

2.2.3.7. IKK 16 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

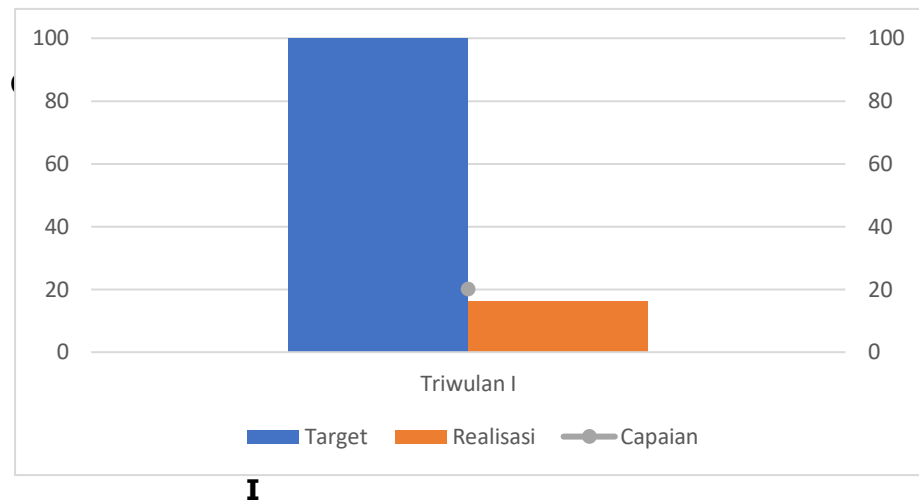
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023 sebesar 16%, jika dibandingkan dengan target

PK Tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 20%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.10 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 16

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

- Adanya anggaran;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kompetensi.

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Kurangnya SDM.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{16}{80} \times 100\% = 20\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 787.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 0,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. Meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor;
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai.

2.2.3.8. IKK 17 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada Tahun 2023.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada Tahun 2023.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada Tahun 2023.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2023.

2.2.4. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan salah satu Balai di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat. Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

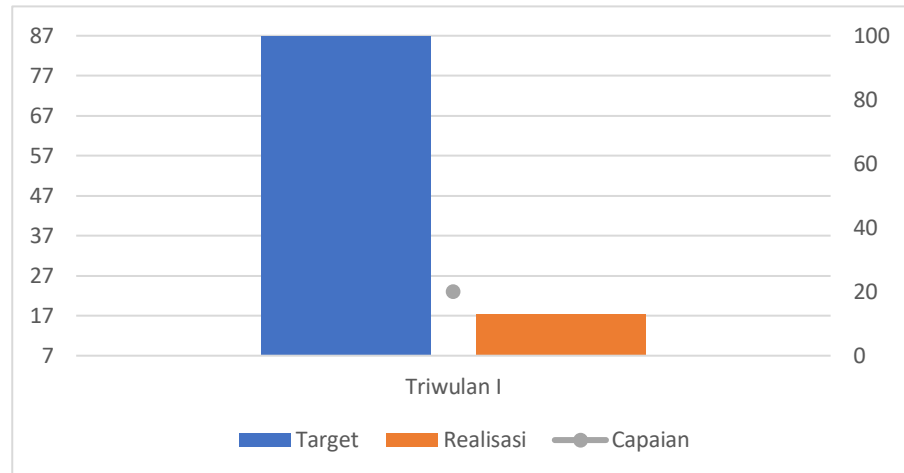
2.2.4.1. IKK 18 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 sebesar 17,4%, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 87%, maka capaian kinerja mencapai 20%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.11 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 IKK 18

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 –2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

- SDM yang cukup dan berkualitas;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Tersedianya anggaran

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Kurangnya SDM.

d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2022.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{8,7}{87} \times 100\% = 10\%$$



e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 4.143.720.000,- Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 264.814.115,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD V Jambi secara optimal;
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

2.2.5. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel

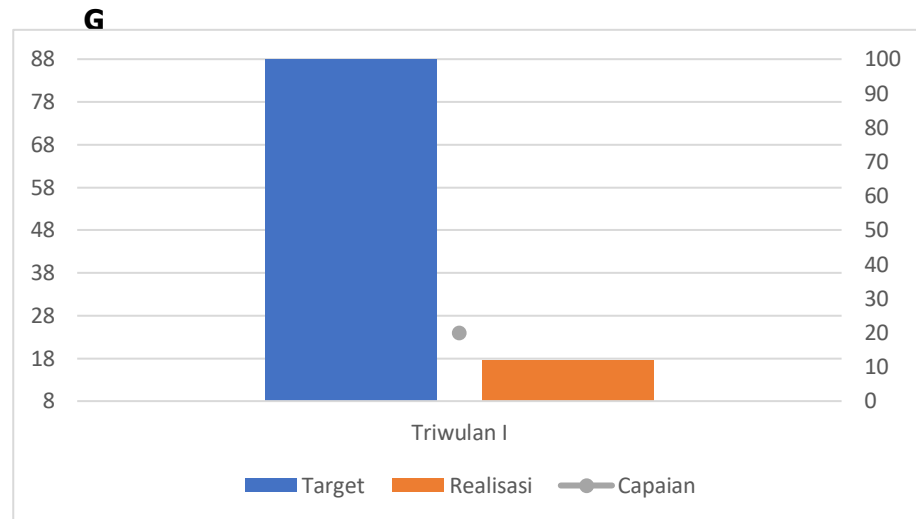
2.2.5.1. IKK 19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat Tahun 2023 sebesar 88%, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 17,6%, maka capaian kinerja mencapai 20%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.12 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 IKK 19

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

- SDM yang cukup dan berkualitas;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Tersedianya anggaran

c. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Kurangnya SDM.



d. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{17,6}{88} \times 100\% = 20\%$$

e. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu:

3. Pagu anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp. 5.902.143.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.578.175.199,-.
4. Pagu anggaran pengadaan perangkat pengelola data dan informasi sebesar Rp. 173.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 130.600.000,-.
5. Pagu anggaran pengadaan belanja modal lainnya sebesar Rp. 410.680.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 112.500.000,-.
6. Pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 17.633.587.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 4.631.347.501,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi.
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023

Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar Rp. 101.360.757.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.14 rincian per sumber dana pagu awal Tahun 2023

Sumber Dana	Pagu
RM	80.623.757.000
PNBP	1.837.000.000
SBSN	18.900.000.000
Total	101.360.757.000

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023

Tabel II.15 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu
Belanja Pegawai	17.633.587.000
Belanja Barang	47.895.203.000
Belanja Modal	35.831.967.000
Total	101.360.757.000

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 022.03.2.403845/2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.360.757.000.

2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 022.03.2.403845/2023 tanggal 27 Desember 2022 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.360.757.000. Terdapat Automatic Adjustment pada Belanja Pegawai (Tunjangan khusus / kegiatan / kinerja sebesar Rp. 2.462.697.000.
3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 022.03.2.403845/2023 tanggal 12 April 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.642.747.000. Pada Revisi tersebut ada penambahan anggaran Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBSN yang tidak terserap pada Tahun 2022 kegiatan Rehabilitasi / Peningkatan UPPKB Pelawan sebesar Rp. 281.990.000.

2. Refocusing Anggaran Tahun 2023

a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023

Pada Revisi ke-1 DIPA terdapat *Automatic Adjustment* pada Sumber Dana Rupiah Murni sebesar Rp. 2.462.697.000.

Tabel II.16 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023

PAGU	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	80.623.757.000	1.837.000.000	18.900.000.000	101.360.757.000
Revisi Ke-1	80.623.757.000	1.837.000.000	18.900.000.000	101.360.757.000

b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023

Pada Revisi ke-1 DIPA terdapat *Automatic Adjustment* pada Jenis Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.462.697.000.

Tabel II.17 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023

PAGU	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
Pagu Awal	17.633.587.000	47.895.203.000	35.831.967.000	101.360.757.000

Revisi Ke-1	17.633.587.000	47.895.203.000	35.831.967.000	101.360.757.000
-------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan I belum terjadi Realokasi Anggaran.

Tabel II.18 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir Per Triwulan I
	101.360.757.000	-	101.360.757.000
Belanja Pegawai	17.633.587.000	-	17.633.587.000
RM	17.633.587.000	-	17.633.587.000
PNBP	-	-	-
SBSN	-	-	-
Belanja Barang	47.895.203.000	-	47.895.203.000
RM	47.895.203.000	-	47.895.203.000
PNBP	-	-	-
SBSN	-	-	-
Belanja Modal	35.831.967.000	-	35.831.967.000
RM	15.094.967.000	-	15.094.967.000
PNBP	1.837.000.000	-	1.837.000.000
SBSN	18.900.000.000	-	18.900.000.000

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan I belum terjadi Realokasi Anggaran.

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.241.347.000	-	77.241.347.000

GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	14.985.836.000	-	14.985.836.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.760.540.000	-	9.760.540.000
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	48.351.251.000	-	48.351.251.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	-	4.143.720.000
WA	Program Dukungan Manajemen	24.119.410.000	-	24.119.410.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	583.680.000	-	583.680.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.902.143.000	-	5.902.143.000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	-	17.633.587.000

cian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2023

II.3.2. Realisasi Anggaran Anggaran Tahun 2023

Berikut adalah rincian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 :

4. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tabel II.20 Realisasi Anggaran Per Kegiatan DIPA TA. 2022

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.241.347.000	77.241.347.000	10.158.486.437	13,15%
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	14.985.836.000	14.985.836.000	1.124.644.587	7,50%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.760.540.000	9.760.540.000	1.562.182.257	16,01%
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	48.351.251.000	48.351.251.000	7.206.845.478	14,91%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	4.143.720.000	264.814.115	6,63%
WA	Program Dukungan Manajemen	24.119.410.000	24.119.410.000	8.169.756.660	34%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	583.680.000	583.680.000	243.100.000	41,65%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.902.143.000	5.902.143.000	1.716.975.199	29,09%

WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	17.633.587.000	6.209.681.461	35,22%
---------	---	----------------	----------------	---------------	--------

5. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Tabel II.21 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Pegawai	17.633.587.000	6.209.681.461	35,22%	11.423.905.539
Barang	47.895.203.000	6.184.946.636	12,91%	41.710.256.364
Modal	35.831.967.000	5.933.615.000	16,56%	29.898.352.000

6. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

Tabel II.22 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
RM	80.623.757.000	18.328.243.097	22,73%	62.295.513.903
PNBP	1.837.000.000	-	0%	1.837.000.000
SBSN	18.900.000.000	-	0%	18.900.000.000

4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Untuk analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja untuk Triwulan I TA. 2023 belum dapat analisa dikarenakan anggaran terkait dengan biaya untuk pelaksanaan kegiatan sehingga manfaat/kinerja dapat terlaksana.



II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk Triwulan I TA. 2023 belum dapat analisa dikarenakan anggaran terkait dengan biaya untuk pelaksanaan kegiatan sehingga manfaat/kinerja dapat terlaksana.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

Berikut uraian atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

Tabel II.23 Tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

USULAN PERUBAHAN JABATAN FUNGSIONAL BPTD WILAYAH V PROVINSI JAMBI					
SEMULA			PERUBAHAN		
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA					
HARWINANTO, SE, MT					
NIP. 19730313 199303 1 005					
Jabatan	Nama/NIP	Kls	B	K	
Analisis Kepegawaian Penyelia	-	8	0	1	
Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	-	7	0	1	
Analisis Kepegawaian Pelaksana	-	6	0	1	
Penyusun Rencana dan Pelaporan	Pande Gede, S, S.Kom. M.si. 19820110 200212 1 003	7	1	1	
Penelaah Kehumasan dan Publikasi	-	7	0	2	
Pengelola Ketatausahaan	Windu Suroso, A.Md 19750211 199803 1 002	7	1	2	
Pengelola Kepegawaian	1. Rilke, S.E 19730427 199803 2 001	7	2	3	
	2. Winda Retno Sari 19960427 201503 2001				
Pengelola Urusan Kerumahtanggaan	1. MJ Mulyono, Amd 19741004 200604 1 001	7	2	2	
	2. Timbul Jelly Sihalohe, SE, MM 19771126 200604 1 002				
Pengelola Keuangan	1. Rio Leismana Rafar, ST, MM 19790403 201001 1 008	7	2	5	
	2. Andrianus Kopong, A.Md 19880408 201503 1004				
Pengelola Data dan Sistem Informasi	M. Sidik Pramono, A.Md 19850812 201001 1 014	6	1	2	
Pengadministrasi Umum	Magdalena Golang Gabelen 19770818 200801 2 004	5	1	2	
JUMLAH		10	22		

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA					
HARWINANTO, SE, MT					
NIP. 19730313 199303 1 005					
Jabatan	Nama/NIP	Kls	B	K	
Analisis Kepegawaian Penyelia	-	8	0	1	
Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	-	7	0	1	
Analisis Kepegawaian Pelaksana	-	6	0	1	
Penyusun Rencana dan Pelaporan	Pande Gede, S, S.Kom. M.si. 19820110 200212 1 003	7	1	1	
Penelaah Kehumasan dan Publikasi	-	7	0	2	
Pengelola Ketatausahaan	Windu Suroso, A.Md 19750211 199803 1 002	7	1	2	
Pengelola Kepegawaian	Rilke, S.E 19730427 199803 2 001	7	2	3	
	Magdalena Golang Gabelen 19770818 200801 2 004				
Pengelola Urusan Kerumahtanggaan	1. Timbul Jelly Sihalohe, SE, MM 19771126 200604 1 002	7	2	2	
	2. M. Sidik Pramono, A.Md 19850812 201001 1 014				
Pengelola Keuangan	1. Rio Leismana Rafar, ST, MM 19790403 201001 1 008	7	4	5	
	2. MJ Mulyono, Amd 19741004 200604 1 001				
	3. Agus Prihanto, A.Md 19750826 199803 1 001				
Pengelola Data dan Sistem Informasi	4. Andrianus Kopong, A.Md 19880408 201503 1004	6	0	2	
	-				
Pengadministrasi Umum	-	5	0	2	
JUMLAH		10	22		

Jambi, Maret 2022
Kepala BPTD Wilayah V
Provinsi Jambi

Bahar

Bahar, ST, MT
NIP. 19711007 199803 1 008



3. Hambatan dan Kendala

Untuk periode Triwulan I Tahun 2023 tidak ada hambatan dan kendala terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik yang bersifat kontraktual maupun rutin.



BAB III

PENUTUP

III.1. Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 ini terdapat 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Triwulan I tahun 2023. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 27% (target 100%);
 - 2) Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - 3) Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 4) Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - 5) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 100% (target 100%);
 - 6) Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 6 lokasi (target 6 lokasi);
 - 7) Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 95% (target 95%);
 - 8) Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - 9) Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 100% (target 100%);
 - 10) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 30% (target 80%);



- 11) Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 0,25% (target 1%)
 - 12) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional tidak ada realisasi dan target dalam indikator kerja tersebut;
 - 13) Jumlah ketersediaan taman edukasi tidak ada realisasi dan target dalam indikator kerja tersebut;
 - 14) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 0 orang (target 1.500orang);
 - 15) Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) tidak ada realisasi dan target dalam indikator kerja tersebut;
 - 16) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 20% (target 80%);
 - 17) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran terealisasi 0% (target 70%)
 - 18) Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai 20% (target 87);
 - 19) Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai 20% (target 88).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi.
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *Zero Accident*.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK	TRIWULAN IV			Evaluasi	tindaklanjut	penanggung jawab
					Target kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	Persen	100	100	27	27	Belum Tercapai	1) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan subsidi angkutan perintis di Provinsi Jambi. 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait dengan pembukaan rute angkutan perintis yang baru.	Seksi LLAJ
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	lokasi	0	0	0	100	Tercapai	-	-
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	4	4	4	100	Tercapai	1) Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang; 2) Meningkatkan fasilitas para penumpang; 3) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap keselamatan transportasi jalan.	Seksi Sarpras
		4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	lokasi	0	0	0	100	Tercapai	-	-

		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100	100	100	100	Tercapai	1) Meningkatkan pengawasan Standar Pelayanan Minimal terhadap fasilitas Dermaga Pelabuhan dan Kapal Penyeberangan; 2) Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang; 3) Meningkatkan pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan.	Seksi TSDPP
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	6	6	6	100	Tercapai	1) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; 2) Melakukan pengawasan secara periodik; 3) Melakukan pembangunan prasarana Pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun.	Seksi TSDPP
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Persen	95	95	95	100	Tercapai	1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Terminal Tipe A di Provinsi Jambi; 2) Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan jalan terkait SPM pelayanan angkutan jalan; 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan jalan yang melanggar ketentuan yang ada.	Seksi Sarpras
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-	-	-	100	Tercapai	-	-

		9. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	Persen	100	100	100	100	Tercapai	1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi; 2) Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan; 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.	Seksi TSDPP
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	80	80	24	30	Belum Tercapai	1) Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rusak; 2) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	Seksi LLAJ
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	1	1	0,25	25	Belum Tercapai	1) Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait maximum Over Dimensi Over Load (ODOL) kendaraan barang; 2) Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan ODOL.	Seksi LLAJ
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional	lokasi	0	0	0	100	Tercapai	-	-
		13. Jumlah ketersediaan taman edukasi	lokasi	0	0	0	100	Tercapai	-	-

		14. Jumlah masyarakat yang tesosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1500	0	0	Belum Tercapai	1) Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas di Sekolah-Sekolah dan kampus serta komunitas. 2) Melaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Transportasi Jalan.	Seksi LLAJ
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	0	0	0	100	Tercapai	-	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	80	80	20	20	Belum Tercapai	1) Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; 2) Meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor.	Seksi Sarpras
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	70	70	0	0	Belum Tercapai	-	-
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	87	20	20	Belum Tercapai	Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD V Jambi secara optimal.	Subbag TU
5.	Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat dan akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat	Nilai	88	88	20	20	Belum Tercapai	Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi.	Subbag TU



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80

		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 14.985.836.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.760.540.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 48.351.251.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 583.680.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.902.143.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

ANGGARAN

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Harwinanto, S.E., M.T.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2023

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

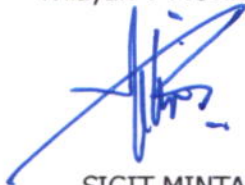
HARWINANTO, S.E., M.T.
NIP. 19730313 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	1. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	2. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	8

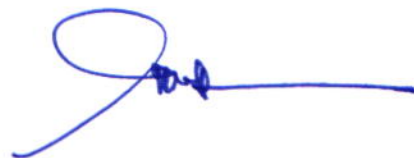
Jambi, Januari 2023

Disetujui
Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



HARWINANTO, S.E., M.T.
NIP. 19730313 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuliana Y.S. Panjaitan, S.SiT

Jabatan : Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Jambi, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana
Transportasi Jalan

YULIANA Y.S. PANJAITAN, S.SiT.
NIP. 19790701 200112 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80

Disetujui
Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi


SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Jambi, Januari 2023

Pihak Pertama
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana
Transportasi Jalan


YULIANA Y.S. PANJAITAN, S.Si.
NIP. 19790701 200112 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fadjar Rijadi, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan

FADJAR RIJADI, S.T., M.T.
NIP. 19711119 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500

Jambi, Januari 2023

Disetujui
Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan



FADJAR RIJADI, S.T., M.T.
NIP. 19711119 199903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuliansyah, S.Sit, MM

Jabatan : Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan Perintis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2023

Pihak Pertama

Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau
Dan Penyeberangan Perintis

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO

NIP. 19680130 199003 1 001

YULIANSYAH, S.Si.T, M.M.

NIP. 19800713 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70

Jambi, Januari 2023

Disetujui
Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi


SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau
Dan Penyeberangan Perintis


YULIANSYAH, S.Si.T, M.M.
NIP. 19800713 200112 1 002



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

JAMBI, JANUARI 2023

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0

		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

Jambi, Januari 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

Sigit MIntarso

NIP. 19680130 199003 1 001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023**

[illegible]

[illegible]

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pengadaan alat kalibrasi uji berkala kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	787,000,000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	200	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (70 unit) termasuk supervisi	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	1,050,000,000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengiriman Diklat Pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Subbag Tata Usaha
					3. Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	200,000,000	Subbag Tata Usaha
					4. Sosialisasi Dasar-dasar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Bagi SDM Perhubungan di Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	171,000,000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					5. Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	110,000,000	Subbag Tata Usaha
					6. Penyusunan SAKIP, SPIP, LAPTAH, dan Profil BPTD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	125,000,000	Subbag Tata Usaha
					7. Koordinasi Kelembagaan Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	350,000,000	Subbag Tata Usaha
					8. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	380,000,000	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan dan Penyeberangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105,000,000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan											Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
					10. Monitoring dan Pemantauan Fasilitas Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Jambi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75.000.000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					11. Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Sungai, Danau dan Penyeberangan (Ramp Check)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					12. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					13. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					14. Monitoring dan Evaluasi Andalalin pada Jalan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90.000.000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					15. Monitoring dan Pembahasan Andalalin pada Jalan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
					16. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan Terminal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
					17. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan UPPKB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	57.720.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					18. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	110.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					19. Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					20. Biaya Penyidikan dan Pendampingan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
					21. Monitoring dan Pembinaan SMK serta SPM Penyelenggaraan Angkutan Umum AKAP dan AJAP di Provinsi Jambi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	65.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
					22. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ditjen Perhubungan Darat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					23. <i>Inhouse Consultant</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88	1. Operasional dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.902.143.000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengadaan perangkat Pengelola Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.000.000	Subbag Tata Usaha
					3. Pengadaan Belanja Modal Lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	410.680.000	Subbag Tata Usaha
					4. Belanja gaji dan tunjangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	17.633.587.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, Januari 2023
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi


Sigit Mintarso
NIP. 19680130 199003 1 001